Penerapan aspek hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja

Indah Pandiangan

Indahpandiangan13@gmail.com

Latar belakang

Proyek konstruksi sangat rentan terhadap kecelakaan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung kenyamanan kerja bagi tenaga kerja, sehingga dapat memperkecil angka kecelakaan dan penyakit kerja pada suatu proyek konstruksi. Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan berbagai peraturan menyangkut keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Tetapi semua usaha pemerintah tidak akan berhasil tanpa adanya respon dari perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi. Wawancara serta observasi telah dilakukan terhadap pekerja, pimpinan proyek dan safety officer pada proyek the Lagoon Tamansari untuk meneliti apakah dalam pelaksanaan proyek tersebut sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dasar penerapan SMK3 disesuaikan dengan standar internasional yaitu OHSAS 18001:2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aspek hukum terhadap K3 pada proyek ini sudah baik karena setiap elemen K3 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun peraturan dan sangsi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini berpengaruh baik kepada tenaga kerja maupun perusahaan karena dapat menghindari kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja dalam proyek the Lagoon Tamansari. Dengan adanya peraturan perundangan undangan tersebut maka telah lengkap landasan hukum untuk melaksanakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Untuk mengetahui penerapan aspek hukum dan juga manajemen K3, perusahaan mengadakan Inspeksi K3, Audit K3 dan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi kondisi yang beresiko agar bisa dilakukan tindakan perbaikan dan juga mengevaluasi pelaksanaan manajemen K3 apakah sudah berjalan baik atau tidak. Sehingga dapat dikatakan sudah berhasil menerapkan Peraturan perundangan undangan K3.

Metode

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif korelatif yang bertujuan untuk menguji hipotesis mengenai kemungkinan antar variabel. Pendekatan penelitian menggunakan crosssectional yaitu peneliti melakukan survei atau pengukuran terhadap variabel bebas dan variabel terikat yang mengumpulkan datanya dilakukan pada satu periode tertentu dan pengamatan hanya dilakukan satu kali selama penelitian.

Hasil

UD. Dinamis abadi dalam rangka untuk melaksanakan perlindungan keselamatan dan kesehatan terhadap tenaga kerja antara lain menyediakan alat – alat pelindung diri berupa alat penutup hidung dan mulut (masker), alat penutup telinga, alat penutup diri berupa pakaian kerja serta penyuluhan, pembinaan, dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang berkenaan dengan pekerjaannya. tapi belum memberikan perlindungan kesehatan kerja antara lain pemberian cuti haid, melahirkan, waktu istirahat, gugur kandungan, cuti tahunan, disamping itu juga belum memberikan upah kerja lembur dan kontrak kerja (perjanjian kerja) yang jelas. Hambatan yang dihadapi UD. Dinamis abadi kelurahan buluri adalah belum mengikutsertakan para pekerjaannya ke dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Di samping itu tingkat kesadaran pekerja dalam menggunakan alat-alat keselamatan kerja masih terbilang rendah. Dalam mengatasi hambatan pada simpulan dua, perusahaan memberikan penyuluhan kepada tenaga kerja, kepala bagian di bidang produksi dan pihak terkait mengenai arti penting keselamatan dan kesehatan kerja.

Pembahasan

Keselamatan Kerja

Keselamatan kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan mesin, pesawat, alat kerja, bahan dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan. Keselamatan kerja berlaku disegala tempat kerja, baik di darat, di laut, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Lokasi proyek merupakan salah satu lingkungan kerja yang mengandung resiko cukup besar. Tim manajemen sebagai pihak yang bertanggung jawab selama proses pembangunan harus mendukung dan

mengupayakan program-program yang dapat menjamin agar dapat meminimalisir bahkan meniadakan kecelakaan kerja.

Hubungan antara pihak yang berkewajiban memperhatikan masalah keselamatan dan kesehatan kerja adalah kontraktor dengan pekerja. Kewajiban kontraktor dan rekan kerjanya adalah mengasuransikan pekerjaannya selama masa pembangunan berlangsung. Pada rentang waktu pelaksanaan pembangunan, kontraktor sudah selayaknya tidak mengizinkan pekerjaannya untuk beraktivitas bila terjadi hal-hal berikut :

1. Tidak mematuhi peraturan keselamatan dan kesehatan kerja;
2. Tidak menggunakan peralatan pelindung diri selama bekerja;
3. Mengizinkan pekerja menggunakan peralatan yang tidak aman.

Tujuan Keselamatan

Kerja Adapun tujuan diselenggarakannya keselamatan kerja adalah :

1. Melindungi tenaga kerja atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaannya,
2. Menjamin keselamatan setiap orang yang berada ditempat kerja,
3. Sumber produksi dipelihara dan dipergunakan secara aman dan efisien.

Syarat-syarat Keselamatan Kerja

Guna memenuhi sasaran keselamatan kerja haruslah memenuhi syarat-syarat keselamatan kerja, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 pasal 3 ayat 1 yaitu :

- A. Mencegah dan mengurangi kecelakaan;
- B. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran;
- C. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan;
- D. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya;
- E. Memberi pertolongan pada kecelakaan;

- F. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja;
- G. Mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebarluasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan getaran;
- H. Mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja baik fisik maupun psikiatrik, peracunan, infeksi dan penularan;
- I. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai;
- J. Menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik;
- K. Menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup;
- L. Memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban;
- M. Memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya;
- N. Mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman atau barang;
- O. Mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan;
- P. Mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar-muat, perlakuan dan penyimpanan barang;
- Q. Mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya.

Kesehatan Kerja

Kesehatan kerja adalah suatu keadaan atau kondisi badan/tubuh yang terlindungi dari segala macam penyakit atau gangguan yang diakibatkan oleh pekerjaan yang dilaksanakan. Penyakit kerja membawa dampak kerugian bagi perusahaan berupa pengurangan waktu kerja dan biaya untuk mengatasi penyakit tersebut. Sehingga bagi pengusaha konstruksi, pencegahan jauh lebih menguntungkan daripada penanggulangannya. Menurut Silalahi N.B. Bennett dan Silalahi B. Rumondang (1985), dikenal dua kategori penyakit yang diderita tenaga kerja yaitu :

1. Penyakit umum (general diseases) Penyakit umum adalah semua penyakit yang mungkin dapat diderita oleh semua orang. Pencegahan penyakit ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat.

2. Penyakit akibat kerja (man made diseases) Penyakit akibat kerja dapat dimulai dengan pengendalian secermat mungkin gangguan kerja dan kesehatan. Gangguan ini terdiri dari:

- a. Beban kerja (ringan/sedang/berat/atau fisik/mental/sosial)
- b. Beban tambahan oleh lingkungan kerja seperti fisik, kimia, biologis, dan psikologis.
- c. Kapasitas kerja, atau kualitas pekerja itu sendiri yang mencakup kemahiran, umur, daya tahan tubuh, jenis kelamin, gizi, ukuran tubuh, dan motivasi kerja.

Perlindungan Tenaga Kerja

Perlindungan tenaga kerja meliputi aspek-aspek yang cukup luas, yaitu perlindungan dari segi fisik yang mencakup perlindungan keselamatan dari kecelakaan kerja dan kesehatannya serta adanya pemeliharaan moral kerja dan perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama, sebagaimana telah ditegaskan pada Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja,
- b. Moral dan kesusilaan,
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat serta nilai-nilai agama.

Perlindungan tersebut dimaksudkan agar tenaga kerja dapat secara aman melakukan pekerjaannya sehari-hari sehingga dapat meningkatkan produksi dan produktivitas pekerjaannya. Tenaga kerja harus memperoleh perlindungan dari berbagai peristiwa disekitarnya dan pada dirinya yang dapat menimpa dan mengganggu dalam pelaksanaan pekerjaannya.

Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Berbagai peraturan perundangan merupakan landasan hukum guna dijadikan pedoman dalam penerapan K3. Berikut ini uraian dari beberapa peraturan perundangan di bidang perlindungan tenaga kerja:

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang No.14 tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Ketenagakerjaan
3. Undang-undang No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
4. Surat Keputusan Bersama Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Tenaga Kerja No.Kep.174/MEN/1986 dan 104/KPTS/1986 Tentang Pedoman Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Tempat Kegiatan Konstruksi.
5. Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang isinya secara spesifik membahas kesempatan an perlakuan yang sama bagi tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, pembinaan dan pengawasan tenaga kerja juga perlindungan tenaga kerja
6. Undang-Undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini sebagai aturan pelaksanaan dari UU No.14 tahun 1969 yang menyangkut norma perlindungan tenaga kerja, khususnya bidang keselamatan kerja
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Per-01/MEN/1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pada Konstruksi Bangunan
8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI. No. Per-05/MEN/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan
9. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-04/MEN/1995 Tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja
10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.02/MEN/1980, tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja

11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.01/MEN/1981, tentang Kewajiban Melaporkan Penyakit Akibat Kerja, sedang pelaksanaannya diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.KEPTS/333/MEN/1989
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.Per.03/MEN/1982, tentang Pelayanan Kesehatan Kerja
13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per-03/MEN/1998 Tentang Tata Cara Pelaporan dan Pemeriksaan Kecelakaan
14. Peraturan Menteri Perburuahan (PMP) No.7 tahun 1964 tentang Syarat Kesehatan Keberhasilan Serta Penerangan Dalam Tempat Kerja.

Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan tentang Penerapan Aspek Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja didapat bahwa PT. Wika Gedung sudah menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Proyek The Lagoon Tamansari dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dengan adanya prosedur manajemen K3 serta peraturan perundang-undangan K3 yang dikeluarkan oleh pemerintah dan juga oleh perusahaan.

Penerapan Aspek Hukum terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja berpengaruh baik kepada perusahaan maupun tenaga kerja karena apabila perusahaan ataupun tenaga kerja yang mengabaikan K3 dalam menjalankan pekerjaan akan diberikan sanksi hukum karena baik perusahaan dan tenaga kerja telah terikat secara hukum. Sebagai contoh apabila para pekerja pada saat melakukan pekerjaan diketinggian dan tidak menggunakan Sabuk Pengaman maka safety officer dapat memberikan sanksi kepada pekerja tersebut sesuai dengan aturan yang dibuat oleh perusahaan.

Menerapkan K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tidak langsung perusahaan dapat mencegah terjadinya kecelakaan dan penyakit kerja serta pelanggaran kerja. Dan juga pekerjaan dapat terlaksana dengan aman dan efisien.

Daftar Pustaka

1. Anizar, 2009. Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Industry, Graha Ilmu, Yogyakarta.
2. Billy, Dengah, Studi Korelasi Antara Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan Peningkatan Produktifitas Tenaga Kerja. Proyek Konstruksi PT. Trakindo Utama Kabupaten Minahasa Utara.
3. Gempur, Santoso, 2004. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Prestasi Pustaka, Jakarta.
4. Ridley, John, 2008. Ikhtisar Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Edisi ketiga, Erlangga, Jakarta.
5. Rijanto B, Boedi, 2010. Pedoman Praktis Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L), Mitra Wacana Media, Jakarta.
6. Silalahi N. B. Bennet dan Silalahi B. Rumondong, 1995. Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
7. Sumamur, 1996. Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan, PT Toko Gunung Agung. Jakarta.
8. Zainudin A, 2009 Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
9. Zainal A, 2006, Dasar-Dasar Hukum Perburuhan, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
10. Asri W. 2009. Hukum Ketenagakerjaan 10 Tahun Pasca Reformasi. Jakarta : Sinar Grafika
11. Simamora, R. H. (2011). ROLE CONFLICT OF NURSE RELATIONSHIP WITH PERFORMANCE IN THE EMERGENCY UNIT OF HOSPITALS RSD DR. SOEBANDI JEMBER. The Malaysian Journal of Nursing, 3(2), 23-32.